

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah memiliki posisi strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pentingnya pengelolaan keuangan daerah terus meningkat, terutama dalam dimensi efektivitas, efisiensi, serta transparansi penggunaan anggaran (Mardiasmo, 2018:45).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi dan pengawasan, menjadi krusial dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Ketiga prinsip ini merupakan pilar utama dalam mendorong tercapainya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang optimal, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan anggaran (Mardiasmo, 2018).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya, termasuk keuangan daerah. Namun demikian, pelimpahan kewenangan ini juga membawa implikasi terhadap peningkatan tanggung jawab dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan diawasi secara ketat (Mahmudi, 2019:92). Dalam kerangka ini, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat (Yassir *et al.*, 2022a).

Regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas mengharuskan setiap instansi pemerintahan menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmennya terhadap ini melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang keduanya



mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien menuntut adanya sinergi antara tiga pilar utama, yakni akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat berjalan secara terpisah dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang baik. Akuntabilitas menuntut pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Sementara itu, pengawasan bertindak sebagai alat kontrol yang memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Di sisi lain, transparansi membuka ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas serta pengawasan (Binawati & Badriyah, 2022; Rasyid *et al.*, 2024:21-23).

Akuntabilitas keuangan adalah komitmen pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jujur, transparan, dan sesuai peraturan kepada publik dan lembaga pengawas. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan laporan yang rinci serta pemantauan penggunaan anggaran agar setiap pengeluaran dilandasi ketentuan hukum yang sah dan efisien (Natisation *et al.*, 2022). Mardiasmo (2018:50) menegaskan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola. Dengan akuntabilitas yang tinggi, pemerintah daerah mampu mencegah penyelewengan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Di Kabupaten Barru, akuntabilitas keuangan diwujudkan dalam berbagai dokumen pelaporan seperti LKjIP dan LPPD, yang disusun berdasarkan RPJMD 2021–2026 dengan visi: “Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan, dan Bernafaskan Keagamaan” (LKjIP Kabupaten Barru, 2023). Penetapan indikator kinerja utama dilakukan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2022.

Penelitian Saputra (2021:68) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan yang tinggi berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah yang akuntabel cenderung lebih transparan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran serta membuka ruang si publik. Mardiasmo (2018) menekankan pentingnya sistem kontrol yang gar laporan keuangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga inkan capaian kinerja yang nyata. Tanpa sistem kontrol memadai, risiko



penyimpangan dan korupsi akan meningkat, menghambat pencapaian pembangunan.

Meski demikian, tantangan masih ada, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya integrasi data lintas sektor, dan kelemahan sistem evaluasi program. Laporan Inspektorat Kabupaten Barru tahun 2023 mengungkapkan lemahnya mekanisme pemantauan dan tindak lanjut terhadap kinerja program.

Tabel 1.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
2020	55,52	CC
2021	57,04	CC
2022	57,34	CC
2023	60,04	B
2024	61,42	B

Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barru selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai akuntabilitas kinerja naik dari 55,52 dengan kategori CC pada tahun 2020 menjadi 61,42 dengan kategori B pada tahun 2024 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024). Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, seperti kategori BB atau A, antara lain melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara serta peningkatan fokus pada kinerja berbasis hasil (*outcome*).

Di sisi lain, pengawasan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selain aspek akuntabilitas, pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan audit independen lainnya memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Siddiq *et al.*, 2020:89). Fungsi pengawasan meliputi tindakan pencegahan, pendeteksian, hingga pengendalian terhadap praktik-praktik yang



tidak sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh mampu memastikan bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran publik (Mahmudi, 2019:98).

Dalam konteks Kabupaten Barru, pengawasan keuangan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kapabilitas APIP pada Level 3 dengan skor 3,00, yang mencerminkan bahwa Inspektorat Kabupaten Barru telah mampu memenuhi 18 topik pada enam elemen kapabilitas secara baik dan berkelanjutan, serta telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Selain itu, audit kinerja yang dilakukan juga telah menunjukkan hasil yang cukup berhasil, dengan skor capaian kinerja mencapai 80,71%, sekaligus menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap program strategis daerah (BPKP, 2024).

Tabel 1.2
Opini Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2019-2023

Tahun	Opini
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 1.2, penguatan pengawasan keuangan tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barru selama tujuh tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2017 hingga 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2024).



eskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang baik, pengawasan pada tingkat pelaksana teknis dinas dan unit kerja lainnya

tetap perlu ditingkatkan. Pengawasan tidak seharusnya bersifat administratif semata, melainkan harus mampu mendeteksi lebih awal potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan. Lebih lanjut, laporan hasil audit BPK menunjukkan bahwa masih terdapat temuan-temuan administratif serta ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berjalan optimal, dan perlu diperkuat baik dari sisi pelaksanaan maupun tindak lanjutnya. Penguatan peran Inspektorat Daerah dan optimalisasi atas implementasi rekomendasi hasil audit menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan (Mahmudi, 2019:98).

Namun demikian, BPK secara berulang menyoroti perlunya peningkatan dalam pengelolaan aset tetap, pengawasan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Apabila rekomendasi ini tidak segera ditindaklanjuti, terdapat risiko ketidakefisienan yang dapat mengganggu kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang (Fahmi, 2021:45).

Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif terbukti mendorong pemerintah daerah untuk lebih hati-hati dalam mengelola anggaran dan membuat keputusan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang kredibel dan responsif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berintegritas dan berkelanjutan.

Sementara itu, transparansi anggaran berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan memperlancar proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada publik, khususnya terkait alokasi dan realisasi anggaran, agar informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Dengan tersedianya informasi ini, masyarakat diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan *Open Budget Survey (OBS)* tahun 2023, Indonesia mencatatkan skor transparansi anggaran sebesar 70 dari skala 1 hingga 100. Skor tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019, yang berarti Indonesia telah mengalami stagnasi dalam hal keterbukaan anggaran. Lebih lanjut, peringkat Indonesia menurun dari posisi ke-17 pada tahun 2021 menjadi posisi ke-20 tahun 2023 dari total 125 negara yang disurvei. Penurunan ini menjadi bukti bahwa strategi peningkatan transparansi anggaran, khususnya di



daerah, masih perlu diperkuat dan dikembangkan (Umam *et al.*, 2024:4). Perbandingan antarnegara di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di bawah Filipina yang berhasil mencapai skor transparansi sebesar 75 dan menempati posisi ke-15 dunia. Sementara itu, secara global, negara seperti Georgia mampu mencatatkan skor 87 dan menduduki peringkat pertama. Fakta ini mengindikasikan bahwa Indonesia, termasuk daerah seperti Kabupaten Barru, memerlukan pendekatan baru dalam memperkuat transparansi sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas dan daya saing internasional (Umam *et al.*, 2024:6).

Transparansi anggaran juga berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Di era digital saat ini, pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah yang bersifat terbuka, mudah diakses, dan mampu menampilkan data secara *real-time* menjadi kebutuhan yang mendesak. Kabupaten Barru dapat memanfaatkan teknologi seperti *e-budgeting*, *e-audit*, dan aplikasi pendukung lainnya untuk mendorong efisiensi, efektivitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Umam *et al.*, 2024:5).

Dalam konteks lokal, publikasi dokumen anggaran daerah di Kabupaten Barru belum sepenuhnya tersedia dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Padahal, keterbukaan tersebut sangat penting untuk menciptakan ruang partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022), keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana anggaran daerah dialokasikan dan digunakan, serta memberikan ruang untuk masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Saputra (2021:72) juga menegaskan bahwa transparansi anggaran tidak hanya memberi akses informasi kepada publik, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penentuan prioritas pembangunan. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan anggaran yang tidak sejalan dengan kebutuhan lokal, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.



eskipun terdapat peningkatan dalam aspek akuntabilitas kinerja dan opini ran keuangan, realisasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan engelolaan keuangan yang efisien. Hal ini menjadi tantangan tersendiri

yang perlu segera diatasi agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat benar-benar terwujud dalam tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan data LPPD Kabupaten Barru tahun 2024, realisasi belanja daerah hanya mencapai 93,98% dari total anggaran, dan realisasi belanja modal untuk infrastruktur baru terealisasi sebesar 83,78%. Data ini mencerminkan bahwa masih terdapat kendala dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran juga tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru yang meskipun mengalami peningkatan dari 73,8 pada tahun 2023 menjadi 74,51 pada tahun 2024, namun masih berada di bawah target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara geografis, Kabupaten Barru berada pada posisi strategis karena terletak di jalur lintas Trans Sulawesi dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, wilayah seluas 1.174,72 km² yang didominasi oleh perbukitan dan garis pantai sepanjang 78 km memerlukan pendekatan pengelolaan keuangan yang berbasis data spasial. Jumlah penduduk yang mencapai 196.001 jiwa pada tahun 2024 dengan distribusi yang tidak merata antarkecamatan menyebabkan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik menjadi semakin kompleks. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan strategis utama yang diidentifikasi, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya tata kelola pemerintahan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan. Ketiga persoalan ini erat kaitannya dengan belum maksimalnya penerapan prinsip akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi dalam proses pengelolaan anggaran.

Komposisi anggaran daerah juga menunjukkan dominasi belanja pegawai yang mencapai 41,56% dari total belanja operasi. Hal ini menandakan bahwa struktur anggaran masih bersifat administratif, belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 98,54% menandakan ketergantungan yang hadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, reformasi daerah mutlak diperlukan untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan daerah.



Tabel 1.3.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	
	Rp.	%
2019	83.734.357.547,35	7,78
2020	71.365.800.219,10	7,17
2021	118.943.534.504,89	11,80
2022	113.815.417.240,35	11,29
2023	92.458.944.262,30	9,25
Total	480.318.053.773,99	9,44

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Barru

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Barru selama periode 2019–2023 tergolong rendah, dengan rata-rata sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai 9,44% dari total anggaran. SiLPA pada tahun 2019 sebesar 7,78%, meningkat menjadi 11,80% pada 2021 dan 11,29% pada 2022. Ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Rendahnya penyerapan anggaran ini dapat disebabkan oleh birokrasi administrasi yang rumit, keterlambatan pelaksanaan program, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang belum maksimal. Selain itu, pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat yang kurang optimal juga menjadi hambatan efisiensi anggaran. Kendala-kendala ini menegaskan perlunya strategi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang lebih efektif, sehingga alokasi sumber daya tepat sasaran. Keberadaan rekomendasi BPK yang berulang setiap tahun serta nilai SiLPA yang tinggi menunjukkan pentingnya upaya perbaikan korektif dan strategis dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.

Dalam praktiknya, implementasi ketiga prinsip akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan seperti terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan publik dan birokrasi yang tertutup masih menjadi tantangan utama. Hambatan ini diakibatkan pada rendahnya kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik (Amin et



al., 2022:18). Meskipun menunjukkan indikator makroekonomi yang positif, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barru yang tumbuh dari Rp9,39 triliun menjadi Rp9,89 triliun dan tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,51% menjadi 4,92% pada tahun 2024, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga mengalami kenaikan dari 73,80 menjadi 74,51, pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tata kelola keuangan publik. Masih terdapat permasalahan dalam implementasi akuntabilitas, efektivitas pengawasan, dan transparansi anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan partisipasi publik (RPJMD Kabupaten Barru, 2023:7-8).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, berbagai persoalan masih terjadi. Contohnya adalah stagnasi skor transparansi dalam *Open Budget Survey*, permasalahan SiLPA yang terus berulang, serta temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak kunjung ditindaklanjuti secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan implementasi di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Yassir *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Enrekang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Binawati dan Badriyah (2022) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, pengawasan keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Studi yang dilakukan oleh Hood dan Dixon, sebagaimana dikutip dalam penelitian Bisogno dan Cuadrado-Ballesteros (2022), menyatakan bahwa lemahnya pengawasan internal serta rendahnya akuntabilitas publik menjadi faktor utama kegagalan berbagai program pemerintah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah konteks keuangan daerah di Indonesia, sehingga masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi.

Temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya memperkuat dilakukannya kajian ini. Ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana ketiga variabel yakni akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi



anggaran saling berinteraksi dan secara kolektif memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Masih terdapat kemungkinan keberadaan variabel mediasi atau moderasi yang belum teridentifikasi, serta potensi sinergi antarvariabel yang dapat menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan peningkatan dalam aspek akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi anggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian empiris untuk menganalisis sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Barru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan tata kelola keuangan daerah, serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat praktik *good governance* di tingkat daerah serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) melalui tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosioekonomi yang unik, yang turut memengaruhi dinamika pengelolaan keuangan serta kompleksitas tantangan yang dihadapi. Dengan berfokus pada Kabupaten Barru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual dibandingkan dengan studi yang bersifat umum.

Melalui analisis terhadap data dan fenomena yang terjadi secara spesifik di Kabupaten Barru, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi kekosongan informasi yang bersifat lokal dan spesifik, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian akademik.

Demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan praktik



pengelolaan keuangan di Kabupaten Barru. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengatasi berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengangkat tema dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan, dan Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Barru.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan untuk mengkaji pengaruh dari akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara parsial?
2. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara parsial?
3. Apakah transparansi anggaran berdampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara parsial.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara parsial.



kaji dan menganalisis dampak transparansi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara parsial.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik tata kelola keuangan publik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai pengaruh akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi publik dan manajemen keuangan daerah.
- b. Landasan Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan di tingkat daerah.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan: Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi anggaran di pemerintahan daerah.
- c. Bagi Masyarakat: Masyarakat dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat



mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini maka peneliti menguraikan kedalam enam bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab dapat diuraikan satu persatu dibawah ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari teori serta penelitian terdahulu.

BAB III: KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

BAB ini berisi tentang rerangka dari penelitian dan penjelasan mengenai pengembangan hipotesis penelitian.

BAB IV: METODE PENELITIAN

BAB ini membahas rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi berbagai pihak, baik dalam lingkup akademik maupun praktis, guna mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori hubungan keagenan menjelaskan tentang kontrak di mana satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hehanussa, 2015). Permasalahan yang sering muncul dalam kualitas laporan keuangan berkaitan dengan benturan kepentingan antara manajemen dan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak demi kepentingan stakeholder, tetapi sering kali bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dan mengamankan posisi mereka tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap stakeholder lain, seperti karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat.

Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat dipandang seperti hubungan antara principal dan agen. Masyarakat (sebagai principal) memberikan wewenang pengaturan kepada pemerintah daerah (sebagai agen) serta menyediakan sumber daya melalui pajak dan berbagai kontribusi lainnya. Pemerintah daerah, sebagai agen, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah diharapkan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menilai, mengukur, dan mengawasi sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Teori keagenan berpendapat bahwa ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara prinsipal dan agen berpotensi memicu penyimpangan atau korupsi oleh agen. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, pengelolaan pemerintah daerah perlu diawasi agar kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan terjamin. Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih seimbang, sehingga keseimbangan informasi berkurang dan potensi korupsi pun semakin kecil.



2.1.2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal merupakan pengembangan dari teori keagenan, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi. Asimetri ini terjadi karena pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain yang berkepentingan, terkait dengan informasi yang dikeluarkan. Dasar teori sinyal adalah ketidakseimbangan perolehan informasi, yang menjadi alasan bagi manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi dapat terjadi antara dua kondisi eksternal: pertama, perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, dan kedua, perbedaan yang sangat signifikan yang dapat berpengaruh terhadap manajemen (Sartono, 2002).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori sinyal menjelaskan pentingnya pemberian informasi kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam, dalam hal ini adalah pemerintah, sementara pihak luar meliputi DPRD, Inspektorat, dan masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi sinyal bagi pihak luar, terutama yang berkepentingan, yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan seharusnya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan, baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan memerlukan informasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

2.1.3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, penting untuk memahami pengertian mengenai "sistem" itu sendiri. Menurut Tata Sutabri (2011:4) dalam bukunya *Konsep Sistem Informasi*, sistem adalah sekelompok unsur yang saling terkait dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, prosedur, menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya *Sistem Akuntansi*, adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan secara seragam dan berulang.

Berdasarkan definisi tersebut, salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Hal ini sangat penting



agar pengelolaan keuangan dapat memenuhi aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini diatur dalam peraturan menteri dan mencakup berbagai aspek, seperti kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum pengelolaan APBD, struktur APBD, penyusunan dan penetapan APBD, serta pengelolaan kas, akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD mengikuti pedoman RKPD dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. APBD memiliki berbagai fungsi, seperti otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Setiap tahun, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan melalui peraturan daerah.

Seiring dengan tuntutan reformasi, APBD yang awalnya bersifat inkremental, kini telah bertransformasi menjadi anggaran berbasis kinerja. Perubahan ini tercermin dalam PP Nomor 105 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada instansi pemerintah di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Dilihat dari perspektif masyarakat, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik akan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif, terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terhadap APBD meningkat setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh tingkat efektivitas penerimaan daerah secara keseluruhan, mencerminkan adanya kesadaran masyarakat untuk memenuhi



kewajibannya kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi.

2. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merujuk pada hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Kinerja ini diukur melalui kuantitas dan kualitas yang terukur, serta efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kemampuan suatu daerah dapat diukur dari seberapa efektif daerah tersebut mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya (Rasyid *et al.*, 2024).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mencakup kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan daerah, mendukung kelancaran sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat, dengan daerah memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dalam batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Surastowo, 2019).

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian hasil kerja di bidang keuangan daerah. Hal ini meliputi perencanaan anggaran dan realisasi anggaran, yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Pemerintah daerah, sebagai bagian dari organisasi sektor publik, bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan lain-lain. Masyarakat sebagai salah satu stakeholder utama dari organisasi sektor publik, berhak menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah melalui DPRD sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur baik finansial maupun non-finansial. Sistem pengukuran ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam organisasi. Kinerja baik bagi pemerintah daerah tercapai ketika administrasi dan



penyediaan jasa dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Kudja *et al.*, 2024)

3. Kriteria Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Rumah Tangga Sendiri

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri (Kudja *et al.*, 2024):

a. Kemampuan Struktural Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung berbagai aktivitas dan tugas yang menjadi beban serta tanggung jawabnya. Jumlah dan jenis unit-unit yang ada harus mencerminkan kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab juga harus jelas agar setiap bagian dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan pemerintahan.

b. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengelola rumah tangga daerah. Keahlian, moralitas, disiplin, dan kejujuran aparat saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan daerah. Kualitas aparat yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan daerah.

c. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah juga harus mampu mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemampuan ini harus mencakup pembiayaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola wilayah, dengan dukungan sumber daya keuangan yang memadai.



e. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai beberapa sasaran penting, antara lain (Umam *et al.*, 2024):

- 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Hal ini membantu memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat mencapai hasil yang optimal.
- 2) Membantu Mengalokasikan Sumber Daya dan Pembuatan Keputusan Melalui pengukuran kinerja, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan anggaran. Ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Mewujudkan Pertanggungjawaban Publik dan Memperbaiki Komunikasi Kelembagaan Pengukuran kinerja keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Hal ini memperbaiki komunikasi antar lembaga dan memastikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka.

Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk beberapa tolok ukur lainnya, antara lain (Surastowo, 2019):

- 1) Menilai Kemandirian Keuangan Daerah Pengukuran kinerja juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat.
- 2) Mengukur Efektivitas dan Efisiensi dalam Merealisasikan Pendapatan Daerah Pengukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan merealisasikan pendapatan daerah secara efektif dan efisien.
- 3) Mengukur Pengelolaan Belanja Daerah Pengukuran kinerja keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana



pemerintah daerah mengelola dan membelanjakan pendapatan daerahnya dengan bijaksana.

- 4) Mengukur Kontribusi Sumber Pendapatan Tujuan ini untuk mengidentifikasi seberapa besar kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah.
- 5) Melihat Pertumbuhan Pendapatan dan Pengeluaran Pengukuran kinerja juga berfungsi untuk melihat perkembangan pendapatan dan pengeluaran daerah dari waktu ke waktu, yang dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah.

f. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai indikator yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator-indikator tersebut meliputi (Dora, 2017):

1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator masukan mencakup segala sesuatu yang diperlukan agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini termasuk jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang diperlukan, infrastruktur yang ada, serta waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Indikator ini memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan memadai.

2) Indikator Proses (Process)

Indikator proses berfokus pada pelaksanaan kegiatan, terutama dari segi kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan efisien. Misalnya, indikator ini dapat mencakup ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan.

3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran mengukur hasil langsung dari suatu kegiatan, baik berupa produk fisik maupun non-fisik. Hal ini mencakup jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil menunjukkan efek jangka menengah dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran ini mencakup kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta produktivitas pegawai atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Indikator ini berfungsi untuk menilai dampak langsung dari keluaran kegiatan terhadap tujuan yang lebih luas.

5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat mengukur pencapaian tujuan akhir dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan atau tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah daerah. Indikator ini menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan.

6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak mengukur pengaruh jangka panjang yang ditimbulkan dari suatu kegiatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Misalnya, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat sebagai hasil dari kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan perubahan signifikan yang terjadi dalam masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah memiliki komponen utama sebagai berikut (Surastowo, 2019):

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ringkasan sumber, aplikasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan ini terdiri dari unsur-unsur berikut:



a) Pendapatan

Semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dan menjadi hak pemerintah daerah, tanpa kewajiban pembayaran kembali. Pendapatan ini diklasifikasikan menjadi:

- (1) Pendapatan asli daerah: penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah.
- (2) Dana perimbangan: dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan.
- (3) Pendapatan lain yang sah: pendapatan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

b) Belanja

Semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana dalam satu tahun anggaran, tanpa pengembalian oleh pemerintah daerah. Belanja ini dibagi menjadi:

- (1) Belanja aparatur daerah: untuk kebutuhan aparatur, seperti kendaraan dinas atau gedung.
- (2) Belanja pelayanan publik: untuk layanan yang dapat langsung dinikmati masyarakat, seperti pembangunan jalan.
- (3) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

c) Pembiayaan

Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan ini meliputi:

- (1) Sumber penerimaan daerah: seperti sisa anggaran tahun lalu, pinjaman, hasil penjualan aset, dan transfer dari dana cadangan.
- (2) Sumber pengeluaran daerah: meliputi pembayaran utang pokok, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa anggaran tahun berjalan.

2) Neraca

Neraca mencerminkan posisi keuangan entitas pelaporan, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.



3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini berisi penjelasan rinci atau analisis terhadap pos-pos yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan ini juga mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan serta informasi tambahan yang diharuskan atau dianjurkan dalam standar akuntansi pemerintahan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

h. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, diwajibkan melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan daerah. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melalui analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dijalankan (Umam *et al.*, 2024).

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah meliputi (Fahril *et al.*, 2014):

- 1) Pihak eksekutif, yang menggunakan hasil analisis sebagai dasar untuk menyusun APBD berikutnya.
- 2) Pemerintah pusat atau provinsi, yang memperoleh masukan untuk membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Masyarakat dan kreditur, sebagai calon pemilik saham daerah yang berpotensi memberikan pinjaman atau membeli obligasi daerah.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang umum digunakan meliputi Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan



target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \left(\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \right) \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012:187), adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2) Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \left(\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \right) \times 100\%$$



Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

3) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_n - P_0}{P_0} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan dikatakan positif jika terjadi peningkatan pada Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal, disertai dengan penurunan Belanja Operasi. Hal ini menunjukkan



bahwa daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari satu periode ke periode berikutnya. Sebaliknya, pertumbuhan dinilai negatif jika peningkatan TPD, PAD, dan Belanja Operasi disertai dengan penurunan Belanja Modal, yang mengindikasikan bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhannya.

4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio ini diperoleh dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer), seperti bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus, serta dana darurat dan pinjaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \left(\frac{P}{B} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Pendapatan Daerah (Total pendapatan yang diterima oleh daerah)
- B = Belanja Daerah (Total belanja yang dikeluarkan oleh daerah)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dari sumber eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, dan sebaliknya. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak masyarakat membayar pajak dan retribusi, hal ini



mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Berikut adalah tabel panduan untuk menilai hubungan antara rasio kemandirian dan kemampuan keuangan daerah:

Tabel 2.2

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Rasio Kemandirian	Keterangan
Sangat Tinggi	Daerah mandiri sepenuhnya
Tinggi	Daerah mandiri sebagian besar
Sedang	Ketergantungan sedang
Rendah	Ketergantungan tinggi

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

Indikator seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja yang optimal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Siddiq *et al.* mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan ekspektasi publik (Siddiq *et al.*, 2020:45).

Dalam konteks ini, akuntabilitas, pengawasan, serta transparansi dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian Mahmudi, akuntabilitas yang meningkat dan pengawasan yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2019:67). Hal ini diperkuat oleh pandangan Saputra, yang menyebutkan bahwa transparansi anggaran yang memadai memainkan peran penting dalam mendukung kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik (Saputra, 2020:112). Alamsyah menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang optimal memerlukan sinergi antara akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi, serta ketiganya harus berjalan secara terintegrasi untuk mencapai hasil yang maksimal (Alamsyah, 2021:88).



2.1.4. Akuntabilitas Keuangan

1. Pengertian Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan salah satu aspek esensial dalam pengelolaan keuangan publik yang memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2018:123). Tingkat akuntabilitas yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Penelitian oleh Mahmudi menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang kuat berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya fokus yang lebih besar pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas yang baik juga dapat membantu dalam mengidentifikasi serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019:78).

2. Kriteria Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang mengharuskan pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparansi, tanggung jawab, dan dalam batas-batas peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kriteria akuntabilitas keuangan yang umumnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah (Tetteh Asare *et al.*, 2024):

a. Transparansi

Keuangan harus dikelola dengan terbuka, memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada publik dan pihak terkait.

b. Tanggung Jawab

Setiap unit pengelola anggaran harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



c. Efisiensi

Pengelolaan keuangan harus memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dengan biaya yang seminimal mungkin.

d. Efektivitas

Keuangan harus dikelola dengan cara yang dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran atau rencana kegiatan.

e. Kepatuhan terhadap Peraturan

Semua pengeluaran dan penerimaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap kegiatan pengelolaan keuangan harus dapat diaudit untuk memastikan kepatuhannya.

f. Pengendalian Internal

Harus ada sistem pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran, serta untuk menjamin proses pengelolaan yang benar.

g. Partisipasi Publik

Pengelolaan keuangan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

h. Pelaporan yang Jelas dan Tepat Waktu

Semua informasi keuangan harus disajikan secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai status keuangan suatu daerah atau organisasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengelolaan, kontrol, dan transparansi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Natision *et al.*, 2022):

a. Kepemimpinan yang Berintegritas

Kepemimpinan yang baik dan berintegritas sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemimpin yang transparan dan bertanggung jawab akan memberikan contoh yang baik bagi seluruh jajaran dalam menjalankan kewajiban keuangan mereka.



b. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang kuat berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini melibatkan prosedur dan kebijakan yang memastikan setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar dan dapat diaudit.

c. Transparansi dan Pelaporan Keuangan

Transparansi dalam pelaporan keuangan memungkinkan publik dan pihak terkait untuk mengetahui penggunaan anggaran dan mendeteksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu mendukung tercapainya akuntabilitas.

d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan faktor utama dalam akuntabilitas keuangan. Setiap pengelolaan dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan, sangat mempengaruhi efektivitas akuntabilitas. Pegawai yang terlatih dan kompeten akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik dan melaksanakan pengawasan yang efektif.

f. Partisipasi Publik dan Stakeholder

Partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan anggaran dan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran akan lebih mendorong transparansi dan tanggung jawab.

g. Pengawasan dan Audit

Pengawasan eksternal, seperti audit yang dilakukan oleh lembaga independen, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Audit yang rutin dan objektif dapat mendeteksi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.



h. Teknologi dan Sistem Informasi Keuangan

Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi keuangan yang baik memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

i. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi akan mendorong setiap anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

4. Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut Albugis (2016), akuntabilitas dalam organisasi publik dapat dinilai melalui empat indikator penting, yang meliputi:

a. Akuntabel Pengelolaan Anggaran yang Dikeluarkan

Pengelolaan anggaran harus mencerminkan prinsip akuntabilitas, yaitu setiap dana yang dikeluarkan harus tercatat dengan benar dan sesuai dengan kenyataan. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar diperlukan dan dikelola secara efisien serta transparan.

b. Pertanggungjawaban Kinerja

Hasil dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh pihak pengelola kepada pihak yang berkepentingan. Proses ini melibatkan penjelasan mendetail mengenai pencatatan anggaran, serta hasil dan dampak dari pengeluaran tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

c. Analisis Kesalahan Pencatatan

Kesalahan dalam pencatatan anggaran atau alokasi dana dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan. Akuntabilitas yang tinggi tercermin dari rendahnya tingkat penyimpangan dan kesalahan dalam pencatatan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan berfungsi dengan baik, dan kesalahan dapat diminimalkan.

d. Upaya Tindak Lanjut Terhadap Kesalahan Pencatatan dan Penyimpangan

Tindak lanjut terhadap kesalahan atau penyimpangan anggaran adalah indikator penting dalam menilai akuntabilitas. Semakin tegas dan efektif tindakan yang diambil untuk mengatasi kesalahan dan



penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang tercapai dalam pengelolaan anggaran publik.

5. Dampak Akuntabilitas Keuangan

Dampak merupakan perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas, baik yang disebabkan oleh faktor alam, kimia, fisika, maupun biologis. Aktivitas ini juga bisa dilakukan oleh manusia, seperti dalam hal akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan. Dampak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang timbul akibat dari adanya suatu peristiwa atau kebijakan, dengan dampak yang dapat bersifat positif atau negatif. Dampak positif mengarah pada kemajuan yang nyata, sementara dampak negatif mengarah pada kemunduran atau penyimpangan dari harapan (Tran *et al.*, 2021,

Dalam konteks penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dampak dari akuntabilitas keuangan, khususnya oleh pemerintah kabupaten. Dampak yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi akibat implementasi akuntabilitas keuangan, yang bisa berdampak pada kemajuan jika akuntabilitas dilaksanakan dengan baik, atau kemunduran jika akuntabilitas tidak diterapkan dalam kurun waktu tertentu (Tran *et al.*, 2021a).

Wibawa (1994) mengungkapkan bahwa dampak suatu kebijakan atau aktivitas dapat mempengaruhi berbagai unit sosial, seperti individu, organisasi, masyarakat, lembaga, dan sistem sosial. Dampak tersebut meliputi:

a. Dampak Individu

Dampak yang terjadi pada individu dapat mencakup aspek biologis atau fisik, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

b. Dampak Organisasional

Dampak ini bisa langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau kelompok, mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mencapai tujuan.

c. Dampak terhadap Masyarakat

Dampak ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan mempengaruhi masyarakat dalam melayani anggotanya.



d. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Kebijakan di sektor tertentu dapat mempengaruhi sektor lain, dan beberapa indikator berikut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan sistem sosial:

- 1) Kelebihan beban (misalnya, pendidikan yang tidak dapat menampung jumlah lulusan).
- 2) Distribusi barang yang tidak merata.
- 3) Kekurangan sumber daya.
- 4) Koordinasi yang buruk (disintegrasi).
- 5) Turunnya legitimasi (dukungan) masyarakat.
- 6) Turunnya kepercayaan, misalnya terhadap lembaga perbankan.

Dalam konteks ini, akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentunya menimbulkan dampak-dampak dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Barru, dengan tujuan untuk:

- a. Tercapainya tujuan dan sasaran anggaran atau keuangan.
- b. Tidak terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Penghargaan atau apresiasi yang diterima.
- d. Mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Kurniawan *et al.*, 2023).

2.1.5. Pengawasan Keuangan

1. Pengertian pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meninjau serta mengevaluasi laporan keuangan dan akuntansi agar semua aktivitas keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pengawasan ini dijalankan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan internal biasanya diemban oleh Inspektorat Daerah, yang bertugas mendeteksi serta mencegah adanya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sejak tahap awal. Sebaliknya, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan (Otoo, 2024).



2. Kriteria Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat berbagai jenis pengawasan keuangan yang memiliki peran untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Berikut adalah jenis-jenis pengawasan keuangan yang umumnya diterapkan (Yunia & Muttaqin, 2022):

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi atau instansi, seperti pejabat keuangan atau unit pengawasan di dalam lembaga tersebut. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Pengawasan internal juga berfungsi untuk mencegah adanya penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan anggaran.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau institusi yang berada di luar organisasi atau instansi yang mengelola keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga audit eksternal, atau pemerintah pusat. Pengawasan eksternal bertujuan untuk memberikan evaluasi objektif terkait penggunaan anggaran dan apakah pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

c. Pengawasan oleh DPR/DPRD

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang ada di pemerintah pusat atau daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme pembahasan anggaran, penyampaian laporan keuangan, serta penerimaan laporan kinerja. DPR/DPRD berperan dalam menilai apakah anggaran yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan publik.

d. Pengawasan oleh Masyarakat (Partisipatif)

Pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran dan kebijakan publik. Melalui forum-forum seperti nasyawah perencanaan pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi agar penggunaan dana



publik tidak disalahgunakan. Masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan melalui transparansi dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah.

e. **Pengawasan oleh Lembaga Pengawas Independen**

Lembaga pengawas independen, seperti lembaga audit atau komisi pengawasan, bertugas untuk mengawasi dan memberikan penilaian terkait penggunaan keuangan publik. Lembaga ini sering kali memiliki peran dalam mengaudit dan menginvestigasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

3. Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Dari beberapa teori yang dijabarkan di atas mengenai definisi pengawasan, penulis menggunakan dimensi sebagai bahan acuan untuk mengisi data operasional variabel dari Handoko (2014:359) yang meliputi dimensi dan indikator sebagai berikut :

a. **Prosedur**

Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

b. **Standar**

Adanya batasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

c. **Ketelitian**

Adanya pengukuran kerja pegawai.

d. **Pengukuran Pekerjaan**

Adanya evaluasi pekerjaan pegawai.

e. **Perbaikan**

Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan

4. Prinsip-prinsip pengawasan keuangan

Secara umum prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut (Felencia, 2022):

a. **Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan.**

b. **Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.**

Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.



- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan definisi (hasil guna).
- f. Pengawasan harus fleksibel.
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
- h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan (*control by exception*).
- i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) (Amin et al., 2022).

2.1.6. Transparansi Anggaran

1. Definisi Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana informasi terkait anggaran dapat diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi anggaran memegang peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan kepada pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Yassir et al., 2022).

Menurut Saputra, transparansi anggaran yang baik berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Alamsyah juga mengungkapkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dalam anggaran cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi serta pengelolaan keuangan yang lebih baik (Binawati & Badriyah, 2022).

Transparansi anggaran merupakan sejauh mana informasi mengenai anggaran dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini memiliki peran vital dalam mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi anggaran, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memantau penggunaan anggaran serta memberikan masukan yang konstruktif kepada



pemerintah, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Secara umum, prinsip-prinsip transparansi meliputi lima hal sebagai berikut (Jung, 2022):

- a. Keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana).
- d. Keterbukaan *register* yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll.).
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi anggaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi anggaran melibatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi transparansi anggaran antara lain (Dewi & Prasajo, 2021):

a. Keterbukaan Informasi

Pemerintah perlu menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dan penggunaan anggaran. Keterbukaan ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.

b. Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan

Sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan terintegrasi, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) atau sistem berbasis digital lainnya, dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan data yang akurat dan *real-time*.

c. Regulasi dan Kebijakan

Peraturan yang jelas dan tegas mengenai kewajiban pelaporan dan pengawasan anggaran sangat berperan dalam menciptakan transparansi. Misalnya, adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mewajibkan pelaporan anggaran dan realisasinya secara terbuka.



d. Kemandirian Pengawasan Internal dan Eksternal

Fungsi pengawasan yang kuat, baik oleh lembaga internal (seperti inspektorat) maupun eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan/BPK), dapat mendorong transparansi. Pengawasan ini memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan.

e. Partisipasi Publik dan Masyarakat Sipil

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penganggaran, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum-forum publik lainnya, dapat meningkatkan transparansi. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan publik.

4. Dampak transparansi anggaran

Transparansi anggaran memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan publik dan kinerja pemerintahan. Beberapa dampak utama dari transparansi anggaran adalah sebagai berikut (Amin *et al.*, 2022):

a. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah

Transparansi anggaran memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawasan untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran. Ini mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi, dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Peningkatan Kepercayaan Publik

Dengan adanya transparansi dalam anggaran, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pemerintah mengelola sumber daya publik dengan cara yang adil dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan proses pemerintahan secara keseluruhan. Kepercayaan yang tinggi berpotensi memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Ketika anggaran disajikan secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Partisipasi ini mencakup pengajuan ide atau masukan terkait prioritas anggaran, yang pada gilirannya dapat



menghasilkan keputusan anggaran yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

d. Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Transparansi anggaran mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Pemerintah yang berkomitmen pada transparansi cenderung memiliki insentif untuk menggunakan anggaran secara lebih bijaksana, menghindari pemborosan, dan memprioritaskan belanja yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

e. Pengurangan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Salah satu dampak paling signifikan dari transparansi anggaran adalah pengurangan potensi korupsi. Ketika informasi anggaran tersedia secara terbuka, tindakan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen menjadi lebih efektif dalam mencegah praktek koruptif. Pembatasan ruang untuk penyalahgunaan anggaran akan memaksa pejabat pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana publik.

f. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan

Informasi yang transparan memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai data dan perspektif dalam menetapkan prioritas anggaran. Proses penganggaran yang berbasis data dan masukan yang jelas dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

g. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Transparansi anggaran memungkinkan pihak ketiga, seperti lembaga pengawasan atau masyarakat sipil, untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dengan lebih efektif. Evaluasi yang lebih baik ini berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan program-program pembangunan.

h. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik

Ketika masyarakat merasa bahwa anggaran dikelola secara transparan dan adil, hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan sosial dan politik. Ketidakpuasan yang rendah berpotensi menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik, karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan negara.



i. Indikator Transparansi

Studi oleh Fahril *et al.*, (2014) mengidentifikasi empat indikator utama dalam mengukur transparansi pelaporan anggaran instansi publik, sebagai berikut:

1) Kemudahan Akses Informasi Publik

Akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mudah dijangkau. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami aliran dana serta alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

2) Pembaruan Informasi dan Pencatatan Berkelanjutan

Pembaruan informasi yang rutin diperlukan untuk meningkatkan akurasi dalam menyampaikan data mengenai aliran anggaran. Dengan pembaruan yang tepat waktu, tingkat transparansi informasi akan semakin tinggi.

3) Penyediaan Informasi yang Jelas tentang Program Kerja dan Biaya

Informasi yang dipublikasikan harus disampaikan secara komprehensif, mencakup nilai anggaran yang dikeluarkan serta rincian program kerja yang telah ditetapkan.

4) Meningkatkan Arus Informasi melalui Kerjasama dengan Media Massa

Kerjasama dengan media massa bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, sehingga transparansi anggaran dapat terjaga dan pengawasan publik dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara holistik pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Studi Fahmi mengungkapkan bahwa sinergi antara akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi anggaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau interaksi ketiga elemen tersebut guna memahami pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori pengelolaan keuangan daerah serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah daerah.



2.2. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris ini membahas sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat mengenai bagaimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dalam berbagai konteks dan memberikan temuan yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan (Suhardjono, 2017:24).

1. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, akuntabilitas keuangan yang baik diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk mengelola anggaran secara transparan dan efisien (Setiawan & Wahyudi, 2019:53). Supriyadi (2018:45) juga menekankan bahwa akuntabilitas keuangan yang tinggi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Purnomo (2020) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Studi ini yang berfokus pada beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah,

semakin baik kualitas pengelolaan keuangan yang mereka capai. Akuntabilitas yang diterapkan mendorong pengelola anggaran untuk



mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya hasil penelitian dari Tran *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran mediasi pada hubungan antara kualitas dan kinerja pelaporan keuangan, dengan implikasi signifikan bagi organisasi publik yang berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi mereka dengan sistem akuntabilitas yang dirancang lebih baik. Selain itu, Dwangu & Mahlangu (2021) juga menyatakan bahwa akuntabilitas menunjukkan hasil yang positif dalam mempengaruhi kinerja pelaporan keuangan suatu instansi, baik secara lokal dan yang lebih besar.

Amri dan Syafrizal (2019) juga mendukung temuan ini melalui studi mereka yang melibatkan 50 instansi pemerintah daerah di Indonesia. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas keuangan suatu instansi, semakin tinggi pula tingkat kepuasan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Studi ini menekankan bahwa adanya sistem akuntabilitas keuangan yang kuat berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik (Haryanto & Pratama, 2020:67). Penelitian lainnya oleh Irawan dan Kartika (2019:89) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menurunkan risiko terjadinya *fraud* serta penyimpangan anggaran.

Peran penting pengawasan keuangan terlihat dalam upayanya memastikan anggaran dikelola sesuai peraturan. Menurut penelitian Siregar dan Putri (2021:102), pengawasan keuangan, baik oleh inspektorat internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berpengaruh signifikan terhadap a pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang efektif tidak hanya egah penyelewengan anggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi 1 setiap tahap pengelolaan keuangan.



Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Wackers *et al.*, (2024) dimana melalui pengawasan yang baik, potensi kesalahan, penyimpangan, atau kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Hal ini mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Selain itu, pengawasan keuangan memberikan masukan penting bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Selanjutnya hasil penelitian dari Zhang *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa perilaku finansialisasi perusahaan secara signifikan memperburuk tunjangan berlebih para eksekutif, dan pengawasan keuangan dari pemerintah dapat mengurangi dampak finansialisasi perusahaan pada konsumsi tunjangan berlebih para eksekutif. Selain itu, ditemukan bahwa peningkatan arus kas adalah mekanisme yang dengannya perilaku finansialisasi secara positif memengaruhi tunjangan berlebih para eksekutif. Lebih jauh, studi ini mengungkapkan bahwa korupsi implisit para eksekutif perusahaan milik negara melalui finansialisasi perusahaan terutama didasarkan pada psikologi kompensasi, yang akan mengurangi efektivitas kontrak kompensasi moneter. Namun, pengawasan keuangan dari pemerintah dapat secara efektif membatasi pengaruh ini.

Penelitian lain oleh Subekti (2020:75) mengonfirmasi bahwa pengawasan keuangan yang konsisten mampu menurunkan risiko *fraud* dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat pengawasan tinggi cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

3. Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi anggaran merupakan salah satu langkah dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat terkait pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami alokasi dan pemanfaatan anggaran, yang memungkinkan keterlibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan anggaran (Nurhaliza, 2021:74). Penerapan transparansi anggaran ini dianggap mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah karena dapat meminimalkan potensi terjadinya korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Santoso, 2022:34).



Dalam hal ini, transparansi anggaran juga dipandang sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahyuni (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Melalui studi yang melibatkan 100 pemerintah daerah di Indonesia, Wahyuni menunjukkan bahwa transparansi anggaran yang tinggi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan (Wahyuni, 2019:162).

Penelitian dari Li *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa ransparansi publik pada suatu instansi berperan penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan dengan publik dengan mengungkapkan dan mengomunikasikan informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial instansi terkait. hasilnya menunjukkan hal berikut: (1) hubungan trnsparasnsi pada CFP dimoderasi oleh kepemilikan pejabat pemerintah dan BUMN; (2) efek moderasi negatif dari kepemilikan pejabat pemerintah; dan (3) efek moderasi negatif dari kepemilikan BUMN. Implikasi penelitian dibahas lebih lanjut. Temuan studi ini memiliki implikasi praktis bagi investor, pemangku kepentingan, dan regulator.

Ditambah lagi, penelitian dari Krah & Mertens (2023) menunjukkan fakta bahwa transparansi keuangan berdampak positif terhadap kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah dan kemauan mereka untuk membayar pajak dan retribusi. Studi ini juga menemukan bahwa transparansi keuangan dan kepercayaan rendah di pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian oleh Susanti dan Gunawan (2021) juga menyimpulkan bahwa transparansi anggaran dapat menurunkan potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka menyatakan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan keterbukaan informasi keuangan cenderung lebih rendah terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran (Susanti & Gunawan, 2021:57).

